



tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta pembayaran kembali pokok dan/atau pembayaran bunga atas pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk Periode Penyaluran Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2024.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.23**.

3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Utang Jangka Panjang	Rp159.640.544.216,00	Rp0,00

Saldo Bagian Lancar Utang jangka Panjang Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp159.640.544.216,00, merupakan Utang Pemerintah Provinsi NTT kepada PT SMI-PEN yang jatuh tempo tahun 2024 dan akan dibayarkan melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun 2024 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 39/KM.7/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta pembayaran kembali pokok dan/atau pembayaran bunga atas pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk Periode Penyaluran Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2024. Saldo pada Tahun 2022 atas Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah senilai Rp0,00, hal ini dikarenakan jatuh tempo atas utang tersebut dimulai pada tahun 2024.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.24**.

4) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Diterima dimuka	Rp2.090.653.209,23	Rp1.281.125.050,05

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 senilai Rp2.090.653.209,23 atau mengalami kenaikan senilai Rp809.528.159,18 dari tahun sebelumnya senilai Rp1.281.125.050,05. Di mana merupakan Pendapatan diterima di muka atas Pembayaran Sewa Ruko dan sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan rincian sebagai berikut,

Tabel 5.89 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

	Uraian	Nilai (Rp)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	456.687.490,01
1	Sewa Ruko	102.750.000,01
2	Gedung Eks Lokabirkra	64.563.333,33
3	Sewa Lahan dan Bangunan (oeba)	124.602.000,00



	Uraian	Nilai (Rp)
4	Sewa tanah di Kompleks UPT Pelabuhan PerikananTerau Kupang	100.585.490,00
5	Sewa Ruang PPI di Kab. Floim	81.875.000,00
6	Tablong (Sewa Gedung)	2.291.666,67
	Plutang Lain-lain (Hasil Sewa dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah)	1.633.965.719,22
1	Sewa Tanah	1.314.624.052,52
2	Kuliner Oepoi	238.825.000,03
3	Sewa Tanah Eks Sekolah Cina	26.075.000,00
4	Sewa Bangunan Kantin Kantor Gubernur NTT Pertama	54.441.666,67
	Jumlah	2.090.653.209,23

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.25, N.25.1, N.25.1.1, N.25.1.2 dan N.25.2.**

5) Utang Belanja

Utang Belanja	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp181.338.426.056,85	Rp23.531.085.676,72

Saldo Utang Belanja Tahun 2023 senilai Rp181.338.426.056,85 mengalami kenaikan senilai Rp157.807.340.380,13 dari tahun sebelumnya senilai Rp23.531.085.676,72. Utang belanja yang terdiri dari:

- a) Utang Belanja Pegawai senilai Rp1.146.531.396,09 terdiri dari utang biaya pemungutan pajak baik itu PKB, BBNKB dan PAP yang dilakukan oleh PNS pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT senilai Rp1.084.650.396,09 dan utang biaya pemungutan terhadap pemungutan pendapatan Retribusi pelayanan kesehatan di Latnakes senilai Rp61.881.000,00.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.26, N.26.1 dan N.26.2.**

- b) Utang Belanja Barang dan Jasa Senilai Rp21.433.326.583,76 merupakan utang Jasa Pelayanan dan Jasa pemeriksaan, utang bahan dan alat laboratorium, pemeliharaan alat kesehatan dan jasa pembakaran limbah serta biaya pemeriksaan RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.27, N.27.1 dan N.27.2.**

- c) Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp319.823.500,00 merupakan utang perlengkapan serta Peralatan dan Mesin pada RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.28.**

- d) Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp464.628.650,00 merupakan utang terhadap kemajuan pekerjaan (progress fisik) atas Aset KDP Jalan pada Dinas PUPR berdasarkan hasil putusan pengadilan nomor 140/PDT/2023/PT KPG karena telah putus kontrak.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.29.**



- e) Utang Transfer Bagi Hasil senilai Rp157.974.115.927,00 merupakan Utang Transfer Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT yang belum dibayarkan per tanggal 31 Desember 2023 atas penerimaan Pajak PAD tahun 2023 berupa Pajak Kendaraan Bermotor senilai Rp57.991.831.223,00, Pajak/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor senilai Rp26.784.712.882,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor senilai Rp73.089.891.746,00 dan Pajak Air Bawah tanah senilai Rp107.680.076,00.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.30**

6) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp0,00	Rp200.243.325.051,00

Utang Jangka Pendek Lainnya tahun 2023 senilai Rp0,00 dan tahun 2022 senilai Rp200.243.325.051,00 merupakan Utang Transfer Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT yang belum dibayarkan per tanggal 31 Desember 2022 atas penerimaan Pajak Daerah tahun 2022.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp796.457.512.834,00	Rp980.877.323.256,00

Jumlah senilai Rp796.457.512.834,00 merupakan sisa Pokok Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN Jangka Menengah (PT SMI-PEN) yang dibayar lebih dari 1 (satu) tahun sesuai Perjanjian Pinjaman Nomor: PERJ-12-7/SMI/0821 tanggal 23 Agustus 2021 yang mulai dibayarkan pada tahun 2024. Pada tahun 31 Desember 2022 saldo atas Kewajiban Jangka Panjang senilai Rp0,00, hal ini dikarenakan terdapat *grace period* atas pinjaman tersebut sampai dengan per 31 Desember 2023.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.31**

3. EKUITAS

Ekuitas	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp10.064.001.342.526,64	Rp10.396.432.365.578,93

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas senilai Rp10.064.001.342.526,64 merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nilai Ekuitas Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp332.431.023.052,29 atau 3,20% jika dibandingkan dengan ekuitas 31 Desember 2022 senilai Rp10.396.432.365.578,93.



D. LAPORAN OPERASIONAL

1. Pendapatan Daerah - LO

Pendapatan Daerah **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Rp4.764.700.558.041,38 **Rp4.595.645.836.542,61**

Pendapatan merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 senilai Rp4.764.700.558.041,38 dan Tahun 2022 senilai Rp4.595.645.836.542,61 atau mengalami kenaikan senilai Rp169.054.721.498,77 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.90 Rincian Pendapatan

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah - LO	1.360.941.625.291,02	1.375.302.062.824,06
2	Pendapatan Transfer - LO	3.196.880.858.342,00	3.060.973.941.512,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	206.878.079.408,36	159.369.832.206,55
	Jumlah	4.764.700.558.041,38	4.595.645.836.542,61

Masing-masing Akun Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut,

a. Pendapatan Asli Daerah - LO

Pendapatan Asli Daerah - LO **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Rp1.360.941.625.291,02 **Rp1.375.302.062.824,06**

Pendapatan Asli Daerah - LO Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2023 senilai Rp1.360.941.625.291,02 dan Tahun 2022 senilai Rp1.375.302.062.824,06 atau mengalami penurunan senilai Rp14.360.437.533,04. Akun PAD - LO ini merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.91 Pendapatan Asli Daerah - LO

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	1.099.384.676.440,04	1.100.178.336.492,33
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	43.415.658.367,66	62.012.512.860,39
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	40.548.379.129,40	68.092.348.724,38
4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	177.592.911.353,92	145.018.884.748,98
	Jumlah	1.360.941.625.291,02	1.375.302.062.824,06

1) Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah - LO **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Rp1.099.384.676.440,04 **Rp1.100.178.336.492,33**

Pajak Daerah - LO merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola Badan Pendapatan dan Aset Daerah. Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual di mana pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2023, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan



Operasional adalah seluruh pendapatan yang merupakan hak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembayaran atas Piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada Pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada Pendapatan LRA. Pendapatan Pajak Daerah – LO terealisasi pada Tahun 2023 senilai Rp1.099.384.676.440,04 dan Tahun 2022 senilai Rp1.100.178.336.492,33 atau mengalami penurunan senilai Rp793.660.052,29 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.92 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LO	292.157.225.713,00	284.826.420.822,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LO	186.335.150.885,00	168.796.403.412,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	252.370.809.222,00	214.277.331.504,00
4	Pajak Air Permukaan – LO	398.988.609,04	379.010.501,33
5	Pajak Rokok – LO	358.122.492.011,00	431.899.170.453,00
	Jumlah	1.099.384.676.440,04	1.100.178.336.492,33

Terdapat selisih Pendapatan Pajak Daerah LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah LO senilai Rp55.437.468.189,00 (Pajak Daerah LO Rp1.099.384.676.440,04 – Pajak Daerah LRA Rp1.154.822.144.629,04).

2) Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Retribusi	Rp43.415.658.367,66	Rp62.012.512.860,39
Daerah – LO		

Pendapatan Retribusi Daerah - LO dipungut dan dikelola oleh 22 (dua puluh dua) SKPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendapatan Retribusi Daerah terealisasi Tahun 2023 senilai Rp43.415.658.367,66 dan Tahun 2022 senilai Rp62.012.512.860,39 atau mengalami penurunan senilai Rp18.596.854.492,73 dengan rincian Pendapatan Retribusi per SKPD sebagai berikut.

Tabel 5.93 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	634.666.000,00	769.968.000,00
2	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.585.414.490,00	5.689.545.389,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	564.001.100,00	1.327.854.140,00
4	Dinas Sosial	66.500.000,00	67.400.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	175.200.000,00	153.000.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	666.902.000,00	3.297.034.040,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	62.700.000,00	35.160.000,00



No.	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
8	Dinas Perhubungan	1.160.704.013,00	1.270.105.538,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	51.000.000,00	62.500.000,00
10	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	192.950.000,00	214.005.200,00
11	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	507.058.000,00	516.418.000,00
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	21.148.500,00	17.185.750,00
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.569.662.489,33	7.535.912.232,05
14	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	469.262.880,00	233.596.000,00
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.740.922.917,00	1.192.238.205,00
16	Dinas Peternakan	5.273.121.000,00	7.057.397.000,00
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	64.001.800,00	44.956.650,00
18	Sekretariat Daerah	344.437.581,00	412.793.403,00
19	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	785.670.753,33	612.437.333,34
20	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	13.292.466.844,00	31.354.695.860,00
21	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	126.250.000,00	111.930.000,00
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.600.000,00	16.200.000,00
	Jumlah	43.415.658.367,66	62.012.512.860,39

Terdapat selisih Pendapatan Retribusi Daerah LRA dengan Pendapatan Retribusi Daerah LO senilai Rp786.388.883,34 (Retribusi Daerah LO Rp 43.415.658.367,66 – Retribusi Daerah LRA Rp 44.202.047.251,00)

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (PHPKDYD) - LO

PHPKDYD – 31 Desember 2023 31 Desember 2022
LO Rp40.548.379.129,40 Rp68.092.348.724,36

Pendapatan ini adalah PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Realisasi pada Tahun 2023 senilai Rp40.548.379.129,40 dan Tahun 2022 senilai Rp68.092.348.724,36 atau mengalami penurunan senilai Rp27.543.969.594,96 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.94 Rincian PHPKDYD – LO

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
PT ASKrida	281.877.216,00	256.360.816,00
PT Jamkrida	13.590.197.496,28	12.761.172.624,37
PT Flobamor	0,00	505.026.181,44
PT Bank NTT	26.676.504.417,12	54.569.788.802,55
Jumlah	40.548.379.129,40	68.092.348.724,36



Terdapat selisih PHPKDYD LRA dengan PHPKDYD LO senilai Rp20.096.911.723,60 (PHPKDYD LO Rp40.548.379.129,40- PHPKDYD LRA Rp60.645.290.853,00).

4) Lain-lain PAD yang Sah - LO

Lain-Lain 31 Desember 2023 31 Desember 2022
PAD yang Rp177.592.911.353,92 Rp145.018.864.746,98
Sah - LO

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan Lain-lain PAD senilai Tahun 2023 senilai Rp177.592.911.353,92 dan Tahun 2022 senilai Rp145.018.864.746,98 atau mengalami kenaikan senilai RpRp32.574.046.606,95 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.95 Rincian Lain-lain PAD yang Sah - LO

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	0,00	32.933.558,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	669.918.732,08	14.264.805.638,58
Penerimaan Jasa Giro - LO	10.288.859.552,07	5.940.147.984,17
Pendapatan Bunga - LO	547.378.553,70	543.570.683,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	1.152.899.763,92	2.925.140.462,35
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	1.932.463.074,78	11.699.532.916,71
Pendapatan Denda Pajak - LO	9.491.076.076,73	9.208.955.683,00
Pendapatan Denda Retribusi - LO	1.618.750,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian - LO	8.164.755.669,25	6.428.806.171,78
Pendapatan BLUD - LO	145.343.600.951,39	94.874.971.668,39
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	341.230,00	0,00
Jumlah	177.592.911.353,92	145.018.864.746,98

Terdapat selisih Lain-Lain PAD Sah LRA dengan Lain-Lain PAD Sah LO senilai Rp 10.227.226.795,71 (Lain-Lain PAD Sah LO Rp177.592.911.353,93 - LRA Rp167.365.684.558,22) dengan rincian per SKPD sebagai berikut.

Tabel 5.96 Rincian Lain-lain PAD yang Sah - LO per SKPD

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	145.343.600.951,39	94.371.818.357,60
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.932.463.074,78	603.155.311,79
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.880.776,00	411.872.763,00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.618.750,00	0,00
5	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	10.159.364.262,61	23.095.022.116,58
6	Badan Keuangan Daerah	20.153.963.538,95	26.537.198.198,01
	Jumlah	177.592.911.353,93	145.018.864.746,98

**b. Pendapatan Transfer – LO**

Pendapatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Transfer - LO	Rp3.196.880.853.342,00	Rp3.060.973.941.512,00

Pendapatan Transfer - LO Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2023 senilai Rp3.196.880.853.342,00 mengalami kenaikan senilai Rp135.906.911.830,00 dari saldo tahun 2022 senilai Rp3.060.973.941.512,00, Pendapatan Transfer - LO merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang diterima dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO sebagai berikut.

Tabel 5.97 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO	3.196.880.853.342,00	3.047.017.700.512,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	0,00	13.956.241.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	3.196.880.853.342,00	3.060.973.941.512,00

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO dapat dirincikan sebagai berikut.

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO

Pendapatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Transfer	Rp3.196.880.853.342,00	Rp3.047.017.700.512,00
Pemerintah		
Pusat- LO		

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat yang diterima dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Realisasi pendapatan transfer untuk periode tahun 2023 senilai Rp3.196.880.853.342,00 dan Tahun 2022 senilai Rp3.047.017.700.512,00 atau mengalami kenaikan senilai Rp149.863.152.830,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.98 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Dana Perimbangan - LO			
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) – LO	58.573.565.000,00	72.498.050.786,00	(13.922.485.786,00)
Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	1.876.608.978.000,00	1.730.933.330.000,00	145.675.648.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	1.261.698.310.342,00	1.243.588.319.746,00	18.109.990.596,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO	3.196.880.853.342,00	3.047.017.700.512,00	149.863.152.830,00



2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

Pendapatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Transfer - LO	Rp0,00	Rp13.956.241.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Insentif Daerah merupakan Pendapatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk periode tahun 2023 senilai Rp0,00 dan Tahun 2022 senilai Rp13.956.241.000,00 atau mengalami penurunan senilai Rp13.956.241.000,00.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Lain-Lain	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendapatan Daerah yang Sah - LO	Rp206.878.079.408,36	Rp159.369.832.206,55

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO merupakan realisasi Pendapatan Hibah - LO Tahun 2023 senilai Rp206.878.079.408,36 dan Tahun 2022 senilai Rp159.369.832.206,55 atau mengalami kenaikan senilai RpRp47.508.247.201,81. Pendapatan Hibah terdiri dari Pendapatan Hibah yang berasal dari Pemerintah Pusat, dari Pemerintah Daerah, dari Kelompok Masyarakat dan dari Organisasi Swasta dalam Negeri. Rincian Lain-lain Pendapatan yang sah sebagai berikut.

Tabel 5.99 Rincian Lain-Lain Pendapatan Hibah – LO

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO	204.631.907.669,34	156.112.478.580,55
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri – LO	1.783.165.000,00	00,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO	459.255.239,02	3.257.291.228,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri – LO	00,00	62.400,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri - LO	3.751.500,00	00,00
Jumlah	206.878.079.408,36	159.369.832.206,55

Terdapat selisih Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LO senilai Rp 203.694.827.959,36 (Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LO Rp206.878.079.408,36 - Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA Rp3.183.251.449,00).

Pendapatan Hibah - LO yang berasal dari Pemerintah Pusat Tahun 2023 senilai Rp204.631.907.669,34 terdiri dari:

Tabel 5.100 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO

Uraian	TA 2023 (Rp)	Keterangan
Hibah Obat-obatan dan Alat Kesehatan	907.215.052,00	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang



Uraian	TA 2023 (Rp)	Keterangan
	144.429.782.203,34	Dinas Kesehatan
Hibah Gedung dan Bangunan	2.087.556.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	4.019.116.000,00	Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan
Hibah Peralatan dan Mesin	9.877.075.920,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	493.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	39.634.911.045,00	Kapal di Dinas Perhubungan
Hibah Uang yang masuk ke KasDa	3.183.251.449,00	Badan Keuangan Daerah
Jumlah	204.631.907.669,34	

Pendapatan Hibah yang berasal dari Pemerintah Daerah dan Kelompok Masyarakat merupakan Hibah Obat dan Alat Kesehatan masing-masing senilai Rp459.255.239,02 dan Rp3.751.500,00 pada RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang, dan Pendapatan Hibah yang berasal dari Organisasi Swasta dalam Negeri senilai Rp1.783.165.000,00 merupakan terdiri dari alat ternak dari prisma aussy senilai Rp1.669.720.000,00 pada Dinas Peternakan dan Hibah Peralatan dan Mesin senilai Rp113.445.000,00 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

2. Beban Daerah - LO

Beban Daerah - LO 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp4.560.507.577.297,67 **Rp 4.352.539.472.155,81**

Beban merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Pada Tahun 2023, Beban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp4.560.507.577.297,67 dan Tahun 2022 senilai Rp4.352.539.472.155,81 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.101 Rincian Beban Daerah - LO

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Pegawai	1.508.957.193.353,08	1.503.626.834.847,37
Beban Persediaan	493.835.936.826,66	675.115.766.104,52
Beban Jasa	632.884.409.425,18	467.437.788.920,60
Beban Pemeliharaan	25.604.397.771,00	15.199.660.113,00
Beban Perjalanan Dinas	126.689.380.977,00	114.848.881.940,00
Beban Bunga	52.451.902.656,85	61.069.423.338,00
Beban Hibah	384.865.144.651,00	298.014.627.669,00
Beban Bantuan Sosial	23.693.310.449,00	45.615.722.518,00
Beban Penyisihan Piutang	1.909.390.606,70	329.015.141,31
Beban Penyusutan dan Amortisasi	735.177.854.677,67	574.120.588.677,01
Beban Bagi Hasil	569.956.867.556,00	593.892.162.687,00



Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Bantuan Keuangan	0,00	13.268.000.000,00
Beban Lain-lain	4.481.788.347,52	0,00
Jumlah	4.560.507.577.297,67	4.352.538.472.155,81

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Rp1.508.957.193.353,09 **Rp1.503.626.834.847,37**

Beban Pegawai disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai senilai belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2023 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya. Beban pegawai merupakan saldo beban pegawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi senilai Rp1.508.957.193.353,09 dan Tahun 2022 senilai Rp1.503.626.834.847,37 atau mengalami kenaikan senilai Rp5.330.358.505,72 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.102 Rincian Beban Pegawai

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.037.802.592.105,00	939.155.850.320,38
Beban Tambahan Penghasilan ASN	128.379.189.984,00	143.643.134.592,00
Beban Penerimaan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	289.892.091.093,09	268.399.648.020,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	45.834.365.936,00	60.545.286.319,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	189.410.354,00	239.872.346,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.314.150.000,00	3.228.000.000,00
Belanja Pegawai BOS	0,00	82.823.138.585,00
Belanja Pegawai BLUD	4.945.393.881,00	5.591.724.865,01
Jumlah	1.508.957.193.353,09	1.503.626.834.847,37

Terdapat selisih Belanja Pegawai LRA dengan Beban Pegawai LO senilai Rp2.648.803.305,91 (Beban Pegawai LO Rp1.508.957.193.353,09 - LRA Rp1.511.605.996.659,00)

b. Beban Persediaan

Beban Persediaan **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Rp493.835.936.826,66 **Rp675.115.766.104,52**

Realisasi Beban Persediaan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp493.835.936.826,66 dan Tahun 2022 senilai Rp675.115.766.104,52 atau mengalami penurunan senilai Rp181.279.829.277,86. Beban Persediaan Tahun 2023 merupakan beban barang pakai habis senilai Rp493.813.827.087,66 ditambah beban barang tak habis pakai senilai Rp22.109.739,00.

**c. Beban Jasa**

Beban Jasa 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp632.884.409.425,18 **Rp479.446.520.910,60**

Beban Jasa periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp632.884.409.425,18 dan Tahun 2022 senilai Rp467.437.788.920,60 atau mengalami kenaikan senilai Rp165.446.620.504,58 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.103 Rincian Beban Jasa

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Jasa		
Beban Jasa Kantor	457.559.414.808,00	288.060.732.392,50
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	105.576.859.484,00	114.515.571.729,00
Beban Sewa Tanah	248.220.000,00	423.956.290,32
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	25.947.641.947,00	21.743.921.000,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.325.083.694,18	3.548.645.308,78
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	154.400.000,00	-
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	4.494.482.505,00	6.905.502.330,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	90.500.000,00	219.023.450,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan	24.078.372,00	2.226.655.904,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	235.000.000,00	499.000.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	13.395.537.941,00	29.284.780.516,00
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	64.778.321,00	0,00
Beban Uang		
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.768.414.353,00	00,00
Jumlah	632.884.409.425,18	467.437.788.920,60

Pada Beban Jasa juga disajikan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi senilai Rp22.768.414.353,00 dan tahun 2022 senilai Rp12.008.731.990,00 disajikan pada Beban Hibah.

d. Beban Pemeliharaan

Beban 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Pemeliharaan **Rp25.604.397.771,00** **Rp15.199.660.113,00**

Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi senilai Rp25.604.397.771,00 dan Tahun 2022 senilai Rp15.199.660.113,00 atau mengalami kenaikan senilai Rp10.404.737.658,00 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.104 Rincian Beban Pemeliharaan

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.000.631.403,00	8.117.017.161,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.289.527.855,00	6.712.684.152,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.725.979.311,00	389.958.800,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	588.259.202,00	0,00
Jumlah	25.604.397.771,00	15.199.660.113,00

e. **Beban Perjalanan Dinas**

Beban	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Perjalanan Dinas	Rp126.689.380.977,00	Rp114.849.881.940,00

Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi senilai Rp126.689.380.977,00 dan Tahun 2022 senilai Rp114.849.881.940,00 atau mengalami kenaikan senilai Rp 11.839.499.037,00.

Atas Realisasi Beban Perjalanan Dinas pada Pemerintah Provinsi NTT tahun 2023 tidak mencerminkan nilai beban yang sebenarnya karena terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp159.017.950,00.

f. **Beban Bunga**

Beban	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Bunga	Rp52.451.902.656,85	Rp61.069.423.338,00

Beban Bunga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp52.451.902.656,85 dan Tahun 2022 senilai Rp61.069.423.338,00 atau mengalami penurunan senilai Rp8.617.520.681,15. Beban Bunga Tahun 2023 merupakan beban bunga pinjaman PT SMI-PEN tahun 2023 senilai Rp55.688.549.678,00 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 39/KM.7/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta pembayaran kembali pokok dan/atau pembayaran bunga atas pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk Periode Penyaluran bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2024, namun telah diatribusikan ke Aset Tetap senilai Rp3.236.647.021,15. Sementara itu, beban bunga tahun 2022 telah diatribusikan ke Aset Tetap yang diperoleh dari Pinjaman PT SMI-PEN.

g. **Beban Hibah**

Beban Hibah	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp384.865.144.651,00	Rp298.014.627.669,00

Beban Hibah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp384.865.144.651,00



dan Tahun 2022 senilai Rp298.014.627.669,00 atau mengalami kenaikan senilai Rp86.850.516.982,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.105 Rincian Beban Hibah

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	136.488.800.000,00	2.138.760.978,00
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0,00	12.008.731.890,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	834.860.000,00	2.684.750.000,00
Beban Hibah kepada BUMN	0,00	1.950.000.000,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia	68.742.332.945,00	102.918.616.860,00
Beban Hibah Dana BOS	176.122.330.806,00	173.638.947.041,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.676.820.800,00	2.676.820.800,00
Jumlah	384.865.144.651,00	298.014.627.669,00

Terdapat selisih Beban Hibah LRA dengan Beban Hibah LO senilai Rp5.419.300.000,00 (Beban Hibah LO Rp384.865.144.651,00 - Beban Hibah LRA Rp379.445.844.651,00). Beban hibah kepada kelompok masyarakat Tahun 2022 merupakan reklasifikasi atas Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Beban Hibah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebar pada Perangkat Daerah pengelola sesuai Tugas Pokok, antara lain:

Tabel 5.106 Rincian Beban Hibah per SKPD

No	Nama SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	227.148.252.861,00	243.128.928.241,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	4.218.952.688,00
3	Dinas Sosial	350.000.000,00	1.090.519.525,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	7.140.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	3.109.098.650,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	999.864.200,00	1.000.000.000,00
7	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.740.440.000,00	3.282.059.434,00
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	7.048.103.000,00	14.279.174.822,00
9	Dinas Peternakan	834.860.000,00	0,00
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	635.000.000,00	3.350.000.000,00
11	Sekretariat Daerah	2.693.003.790,00	9.221.800.000,00
12	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	3.312.011.215,00
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	139.415.620.800,00	4.260.748.030,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	889.000.000,00
15	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0,00	1.040.379.250,00
16	Badan Keuangan Daerah	0,00	368.861.499,00
17	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	0,00	5.357.958.315,00
	Jumlah	384.865.144.651,00	298.014.627.669,00

**h. Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp23.693.310.449,00	Rp45.615.722.518,00

Beban Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp23.693.310.449,00 dan Tahun 2022 senilai Rp45.615.722.518,00 atau mengalami penurunan senilai Rp21.922.412.069,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.107 Rincian Beban bantuan Sosial

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	450.810.449,00	1.502.480.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu dan/atau Keluarga	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	20.432.500.000,00	33.441.553.846,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.810.000.000,00	5.951.320.000,00
Beban Bantuan Sosial kepada Pemerintah	0,00	4.720.368.872,00
Jumlah	23.693.310.449,00	45.615.722.518,00

Terdapat selisih Beban Bantuan Sosial LRA dengan Beban Bantuan Sosial LO senilai Rp148.410.449,00 (Beban Bantuan Sosial LO Rp23.693.310.449,00 - Beban Bantuan Sosial LRA Rp23.544.900.000,00). Beban Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebar pada Perangkat Daerah pengelola sesuai Tugas Pokok, antara lain:

Tabel 5.108 Rincian Beban Bantuan Sosial per SKPD

No	Nama SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Dinas Sosial	18.510.000.000,00	21.111.000.000,00
2	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.152.500.000,00	2.725.000.000,00
3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	620.000.000,00	270.000.000,00
4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	148.410.449,00	8.844.553.846,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	270.000.000,00
6	Sekretariat Daerah	3.282.400.000,00	4.818.480.000,00
7	Badan Keuangan Daerah	0,00	7.576.688.872,00
	Jumlah	23.693.310.449,00	45.615.722.518,00

i. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp1.909.390.606,70	Rp329.015.141,31

Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp1.909.390.606,70 dan Tahun 2022 senilai Rp329.015.141,31 atau



mengalami kenaikan senilai Rp1.580.375.465,39 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.109 Rincian Beban Penyisihan Piutang

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	19.519.278,10	19.842.549,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	20.089.460,00	70.200.320,00
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.863.905.157,77	228.320.769,76
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	5.896.710,83	10.851.502,56
Jumlah	1.909.390.606,70	329.015.141,31

j. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Penyusutan Rp735.177.854.677,67 Rp574.120.588.677,01
dan
Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp735.177.854.677,67 dan Tahun 2022 senilai Rp574.120.588.677,01 atau mengalami kenaikan senilai Rp161.057.266.000,66 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.110 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	232.373.445.944,31	214.516.717.113,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	63.552.668.634,46	44.005.303.598,52
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	436.847.637.206,98	314.436.869.953,90
Beban Penyusutan Properti Investasi	270.748.772,78	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	28.111.442,08	3.600.000,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2.107.242.677,06	1.158.098.011,59
Jumlah	735.177.854.677,67	574.120.588.677,01

1) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp232.373.445.944,31 dan Tahun 2022 senilai Rp214.516.717.113,00 atau mengalami kenaikan senilai Rp17.856.728.831,31.

2) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp63.552.668.634,46 dan Tahun 2022 senilai Rp44.005.303.598,52 atau mengalami kenaikan senilai Rp19.547.365.035,94.



3) Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp436.847.637.206,98 dan Tahun 2022 senilai Rp314.436.869.953,90 atau mengalami kenaikan senilai Rp122.410.767.253,08.

4) Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Lainnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp0,00 dan Tahun 2022 senilai Rp3.600.000,00 atau mengalami penurunan senilai Rp3.600.000,00.

5) Beban Penyusutan Properti Investasi

Beban Penyusutan Properti Investasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp270.748.772,78 dan Tahun 2022 senilai Rp0,00, atau mengalami kenaikan senilai Rp 270.748.772,78.

6) Beban Penyusutan Aset Lainnya

Beban Penyusutan Aset Lainnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp26.111.442,08 dan Tahun 2022 senilai Rp0,00 atau mengalami kenaikan senilai Rp26.111.442,08.

7) Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp2.107.242.677,06 dan Tahun 2022 senilai Rp1.158.098.011,59 atau mengalami kenaikan senilai Rp949.144.665,47.

k. Beban Transfer - Bagi Hasil

Beban	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Bagi Hasil	Rp569.956.867.556,00	Rp583.892.162.887,00

Beban Transfer Bagi Hasil Tahun 2023 terealisasi senilai Rp569.956.867.556,00 dan Tahun 2022 senilai Rp583.892.162.887,00 atau mengalami penurunan senilai Rp13.935.295.331,00. Beban Transfer Bagi Hasil merupakan Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan Tahun 2022.

**l. Beban Bantuan Keuangan**

Beban Bantuan Keuangan	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp0,00	Rp13.268.000.000,00

Beban Transfer Bagi Hasil Tahun 2023 terealisasi senilai Rp0,00 dan Tahun 2022 senilai Rp13.268.000.000,00 atau mengalami penurunan senilai Rp13.268.000.000,00. Beban Bantuan Keuangan tahun 2022 merupakan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berupa penanganan Kemiskinan Ekstrem senilai Rp7.318.000.000,00 dan Pembangunan ruas jalan Bonleu di Kabupaten TTS senilai Rp5.000.000.000,00 dan Pembangunan jalan Usaha Tani di Kabupaten Flores Timur senilai Rp500.000.000,00, Rehabilitasi Jalan Praing karahe-Wabang di Kabupaten Sumba Timur senilai Rp300.000.000,00 serta Saluran Irigasi Oebelo Amanuban Selatan di Kabupaten TTS senilai Rp150.000.000,00.

m. Beban Lain-lain

Beban Lain- Lain	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp4.481.788.347,52	Rp00,00

Beban Lain-lain Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp4.481.788.347,52 dan tahun 2022 senilai Rp0,00 atau mengalami kenaikan senilai Rp4.481.788.347,52. Realisasi Tahun 2023 merupakan defisit penurunan nilai investasi akibat kerugian pada BUMD tahun 2022 yakni PT KI Bolok dan PT Flobamor sehingga mengurangi nilai Investasi Permanen Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp4.377.193.297,52 ditambah aset di bawah kapitalisasi pengadaan tahun 2023 senilai Rp104.595.050,00.

3. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp204.192.980.743,71	Rp243.106.364.386,80

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional tahun 2023 senilai Rp204.192.980.743,71 mengalami penurunan senilai Rp38.913.383.643,09 tahun 2022 senilai Rp243.106.364.386,80.

4. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	(Rp151.840.746,01)	(Rp418.377.392,72)

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 senilai (Rp151.840.746,01) mengalami kenaikan senilai Rp266.536.646,71 dari saldo tahun 2022 senilai (Rp418.377.392,72). Jumlah tersebut merupakan Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional, dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.111 Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	1.799.815.127,00	41.876.000,00	1.757.939.127,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	1.052.023.196,31	(1.052.023.196,31)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	24,30	2.999,97	(2.975,67)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional	1.799.815.151,30	1.103.902.196,28	695.912.955,02
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	1.209.653.540,31	470.500.001,00	739.153.539,31
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	742.002.357,00	1.051.778.588,00	(309.777.231,00)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	1.951.655.897,31	1.522.279.589,00	429.376.308,31
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(151.840.746,01)	(418.377.392,72)	266.536.646,71

Surplus dari Kegiatan Non Operasional tahun 2023 senilai Rp1.799.815.151,30 dibandingkan tahun 2022 senilai Rp1.103.902.196,28 mengalami kenaikan senilai Rp695.912.930,72. Surplus dari Kegiatan Non Operasional tahun 2023 merupakan Surplus Penjualan BMD yang tidak dipisahkan senilai Rp1.799.815.127,00 ditambah dengan Surplus Investasi Non Permanen/kelebihan pembayaran pengembalian Investasi Non Permanen Roda 4 (empat) senilai Rp24,30 sedangkan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2023 senilai Rp1.951.655.897,31 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 senilai Rp1.522.279.589,00. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 merupakan Defisit dari kegiatan Non Operasional karena kerugian karena penghapusan aset pemerintah, barang *expired* dan hewan yang mati.

5. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Sebelum Pos Luar Biasa	Rp204.041.139.997,70	Rp242.687.986.994,08

Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa tahun 2023 senilai Rp204.041.139.997,70 mengalami penurunan senilai Rp38.646.846.996,38 dari saldo tahun 2022 senilai Rp242.687.986.994,08.

6. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp0,00	Rp0,00

Pos Luar Biasa tahun 2023 senilai Rp0,00 tidak ada kenaikan ataupun penurunan dari saldo tahun 2022 senilai Rp0,00.



7. Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO	<u>31 Desember 2023</u> Rp204.041.139.997,70	<u>31 Desember 2022</u> Rp242.687.986.994,08
----------------------	---	---

Surplus/Defisit - LO dari kegiatan operasional merupakan selisih antara Pendapatan - LO dan Beban - LO selama satu periode kegiatan operasi. Kemudian ditambah dengan Surplus Non Operasional - LO lalu dikurangi Defisit Non Operasional - LO. Surplus/Defisit - LO selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp204.041.139.997,70 dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp242.687.986.994,08. Surplus/Defisit - LO diperoleh dari:

Tabel 5.112 Rincian Defisit Non Operasional - LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Pendapatan - LO	4.764.700.558.041,38	4.595.645.836.542,61
Beban Operasi - LO	4.560.607.577.297,67	4.352.539.472.155,81
Surplus Non Operasional	1.799.815.151,30	1.103.902.195,28
Defisit Non Operasional	1.951.655.897,31	1.522.279.589,00
Surplus/Defisit - LO	204.041.139.997,70	242.687.986.994,08

E. LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi NTT adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas selama 1 (satu) periode akuntansi dan saldo kas pada tanggal pelaporan serta diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris.

I. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	<u>31 Desember 2023</u> Rp783.515.088.070,99	<u>31 Desember 2022</u> Rp826.473.544.937,78
--	---	---

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 senilai Rp783.515.088.070,99 dan Tahun 2022 senilai Rp826.473.544.937,78. Jumlah tersebut merupakan selisih Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	<u>31 Desember 2023</u> Rp4.623.083.111.643,26	<u>31 Desember 2022</u> Rp4.426.323.752.697,23
---------------------------------------	---	---

Jumlah senilai Rp4.623.083.111.643,26 merupakan jumlah Arus Kas Masuk ke Bendahara Umum Daerah dari keseluruhan aktivitas Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 dan senilai Rp4.426.323.752.697,23 untuk tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.113 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	1.154.822.144.629,04	1.095.501.455.474,33
2	Penerimaan Retribusi daerah	44.202.047.251,00	61.613.862.027,05
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	60.645.290.853,00	37.175.980.457,00
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	165.551.409.006,22	169.296.874.334,85
5	Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	56.371.880.113,00	65.358.885.115,00
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.876.808.978.000,00	1.730.933.330.000,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	1.261.698.310.342,00	1.243.588.319.746,00
8	Dana Insentif Daerah	-	13.956.241.000,00
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	-	-
10	Penerimaan Hibah	3.183.251.449,00	8.698.824.543,00
11	Penerimaan Dana Darurat	-	-
12	Penerimaan Pendapatan	-	-
13	Penerimaan dari Pendapatan	-	-
	Jumlah Arus Kas Masuk	4.623.083.111.643,26	4.426.323.752.697,23

b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Keluar 31 Desember 2023 31 Desember 2022
dari Aktivitas Rp3.839.568.023.572,27 Rp3.599.850.207.759,45
Operasi

Jumlah senilai Rp3.839.568.023.572,27 merupakan jumlah Arus Kas Keluar dari Bendahara Umum Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas operasi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.114 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	1.511.605.998.659,00	1.421.874.102.462,37
2	Pembayaran Barang dan Jasa	1.207.862.533.807,27	1.208.109.054.095,84
3	Pembayaran Bunga	62.884.046.386,00	54.539.281.319,24
4	Pembayaran Subsidi	-	-
5	Pembayaran Hibah	379.445.844.651,00	335.277.916.325,00
7	Pembayaran Bantuan Sosial	23.544.900.000,00	32.050.800.000,00
8	Pembayaran Tidak Terduga	707.344.000,00	7.228.173.756,00
9	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	653.517.359.069,00	527.502.899.801,00
10	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	-	-
11	Pembayaran Bagi Hasil Lainnya ke Kabupaten/Kota	-	-
12	Pembayaran Bantuan Keuangan	-	13.268.000.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	3.839.568.023.572,27	3.599.850.207.759,45



2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Aktivitas Investasi (Rp720.720.625.936,20) (Rp1.327.129.141.125,34)

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 senilai (Rp720.720.625.936,20) dan tahun 2022 senilai (Rp1.327.129.141.125,34), jumlah tersebut merupakan selisih antara Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi.

a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk 31 Desember 2023 31 Desember 2022
dari Aktivitas Rp140.621.397.749,30 Rp3.673.305.472,00
Investasi

Selama Tahun 2023, Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah senilai Rp140.621.397.749,30 yang terdiri dari penjualan atas Aset Lainnya - Aset Lain-lain senilai Rp1.814.275.552,00 dan Penjualan Investasi Non Permanen senilai Rp2.318.322.197,30 ditambah Pencairan Dana Cadangan Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp136.488.800.000,00. Pencairan Dana Cadangan Pemerintah Provinsi NTT merupakan pencairan tahap I (pertama) sebesar 40% dari total Dana Hibah senilai Rp136.488.800.000,00 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Komisi Pemilihan Umum Prov. NTT Nomor: 200.2/2647/BKUD5/2023 dan Nomor: 4/PP.01.2-NK/53/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024. Sedangkan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022 adalah senilai Rp3.673.305.472,00 merupakan penjualan atas Aset Tetap Peralatan Kantor yang telah berakhir masa manfaatnya senilai Rp149.809.558,00 dan Penjualan Investasi Non Permanen senilai Rp3.523.495.914,00, yang dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.115 Rincian Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Pencairan Dana Cadangan	136.488.800.000,00	-
2	Penjualan atas Tanah	-	-
3	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	149.809.558,00
4	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
5	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
7	Penjualan dari Aset Tetap Lainnya	-	-
8	Penjualan dari Aset Lainnya	1.814.275.552,00	-
9	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
10	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	2.318.322.197,30	-
	Jumlah Arus Kas Keluar	140.621.397.749,30	3.673.305.472,00



b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp861.342.023.685,50 **Rp1.330.802.446.597,34**

Jumlah senilai Rp861.342.023.685,50 merupakan jumlah Arus Kas Keluar untuk memperoleh Aset Tetap dan Investasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023, dengan tujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan kepada publik dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.116 Rincian Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	240.000.000.000,00	100.000.000.000,00
2	Perolehan Tanah	-	1.050.294.656,00
3	Perolehan Peralatan dan Mesin	190.621.780.166,50	144.284.448.880,00
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	248.250.770.111,00	141.655.437.253,34
5	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	165.271.232.138,00	909.704.835.682,00
7	Perolehan Aset Tetap Lainnya	24.198.241.271,00	20.107.430.248,00
8	Perolehan Aset lainnya	-	-
9	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	14.000.000.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	861.342.023.685,50	1.330.802.446.597,34

3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 31 Desember 2023 31 Desember 2022
(Rp24.618.102.733,00) **Rp521.145.337.366,10**

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan tahun 2023 senilai (Rp24.779.266.206,00) dan tahun 2022 senilai Rp521.145.337.366,10. Jumlah tersebut merupakan selisih antara Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan.

a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp161.163.473,00 **Rp730.098.883.256,00**

Tahun 2023 Arus Kas Masuk yang berasal dari Aktivitas Pendanaan senilai Rp161.163.473,00 merupakan Koreksi/Dampak Perubahan atas Kas tahun sebelum tahun 2023 sedangkan pada Tahun 2022 Arus Kas Masuk yang berasal dari Aktivitas Pendanaan senilai Rp730.098.883.256,00 merupakan pembiayaan yang berasal dari Pinjaman Dalam Daerah-Lembaga Keuangan Non Bank yaitu Pembiayaan dari PT SMI-PEN berupa pembayaran sisa pendanaan sesuai paket kontrak yang telah dibayarkan uang mukanya pada tahun 2021 senilai 25% dari nilai Kontrak. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dapat dirincikan lebih lanjut sebagai berikut.



Tabel 5.117 Rincian Arus Kas Masuk Aktivitas Pendanaan

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SilPA)	161.163.473,00	-
2	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
3	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
4	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
5	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Bank Keuangan Bukan Bank	-	730.098.883.256,00
7	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
8	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
9	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
10	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Jumlah Arus Kas Keluar	161.163.473,00	730.098.883.256,00

b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan	<u>31 Desember 2023</u> Rp24.779.266.206,00	<u>31 Desember 2022</u> Rp208.953.545.889,90
--	--	---

Selama Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan senilai Rp24.779.266.206,00 yang digunakan untuk pengembalian Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Non Keuangan Bank (PT SMI-PEN) senilai Rp24.779.266.206,00 akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Pejabat Pembuat-Komitmen (PPK-SKPD) terhadap Penyedia (Kontraktor). Sedangkan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2022 senilai Rp208.953.545.889,90 digunakan untuk membayar pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank (PT Bank NTT) senilai Rp70.896.337.803,90 dan Lembaga keuangan Non Bank (PT SMI-Reguler) senilai Rp138.057.208.086,00. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan dapat dirincikan lebih lanjut sebagai berikut.

Tabel 5.118 Rincian Arus Kas Keluar Aktivitas Pendanaan

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lain	-	-
3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	70.896.337.803,90
4	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	24.779.266.206,00	138.057.208.086,00



No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
7	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
8	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
9	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar		24.779.266.206,00	208.953.545.889,90

4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Aktivitas Transitoris Rp201.458.557,00 Rp0,00

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 senilai Rp201.458.557,00 dan tahun 2022 senilai Rp0,00, Jumlah tersebut merupakan selisih antara Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris. Hal ini dikarenakan terdapat Perhitungan Pihak Ketiga pada 24 (dua puluh empat) sekolah atas PPh 21 senilai Rp13.168.900,00, PPh 23 senilai Rp24.140.927,00 dan PPN senilai Rp164.148.730,00 yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2023.

a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Masuk 31 Desember 2023 31 Desember 2022
dari Aktivitas Rp230.506.614.064,88 Rp310.322.047.979,11
Transitoris

Jumlah senilai Rp230.506.614.064,88 merupakan jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga. Sedangkan jumlah senilai Rp310.322.047.979,11 merupakan jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga Tahun 2022.

b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Keluar 31 Desember 2023 31 Desember 2022
dari Aktivitas Rp230.305.155.507,88 Rp310.322.047.979,11
Transitoris

Jumlah senilai Rp230.305.155.507,88 merupakan jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dari Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga. Sedangkan jumlah senilai Rp310.322.047.979,11 merupakan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran Pemerintah Provinsi NTT dari Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga Tahun 2022.



5. Kenaikan/(Penurunan) Kas

Kenaikan/Penurunan Kas	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp38.377.817.958,79	Rp20.489.741.178,54

Tahun 2023 terjadi Kenaikan Kas senilai Rp38.377.817.958,79 yang diperoleh dari penambahan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi senilai Rp783.515.088.070,99, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi senilai (Rp720.720.625.936,20), Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan senilai (Rp24.618.102.733,00) dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris senilai Rp201.458.557,00. Tahun 2022 terjadi Kenaikan Kas senilai Rp20.489.741.178,54 yang diperoleh dari penambahan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi senilai Rp826.473.544.937,78, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi senilai (Rp1.327.129.141.125,34), Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan senilai Rp521.145.337.366,10 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris senilai Rp0,00.

6. Saldo Awal Kas

Saldo Awal Kas	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp83.034.698.805,15	Rp62.544.957.626,61

Jumlah Saldo Awal Kas tahun 2023 senilai Rp83.034.698.805,15 merupakan Saldo Akhir Kas tahun 2022 senilai Rp83.034.698.805,15 yang terdiri dari Kas di BUD senilai Rp52.146.215.485,65, Kas di BLUD senilai Rp29.752.472.409,60, dan Kas di Bendahara BOS senilai Rp1.136.010.909,90. Saldo Awal Kas tahun 2022 senilai Rp62.544.957.626,61 merupakan Saldo Akhir Kas tahun 2021 yang terdiri dari Kas di BUD senilai Rp28.715.366.773,07, Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp580.908.361,00, Kas di BLUD senilai Rp31.630.061.706,54, dan Kas di Bendahara BOS senilai Rp1.618.620.786,00.

7. Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp121.412.516.763,94	Rp83.034.698.805,15

Jumlah Saldo Akhir Kas tahun 2023 senilai Rp121.412.516.763,94 diperoleh dari penambahan Kenaikan/Penurunan Kas senilai Rp38.377.817.958,79 dan Saldo Awal Kas senilai Rp83.034.698.805,15. Jumlah Saldo Akhir Kas tahun 2022 senilai Rp83.034.698.805,15 diperoleh dari penambahan Kenaikan/Penurunan Kas senilai Rp20.489.741.178,54 dan Saldo Awal Kas senilai Rp62.544.957.626,61. Saldo Akhir Kas tersebar pada Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara BOS dan Kas Lainnya yang dapat dirincikan sebagai berikut.



Tabel 5.119 Rincian Saldo Akhir Kas

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Saldo Akhir Kas di BUD	84.961.278.910,77	52.146.215.485,65
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	69.436.915,00	0,00
Saldo Akhir Kas di BLUD	35.125.338.923,99	29.752.472.409,60
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	1.053.496.951,00	1.136.010.909,90
Saldo Akhir Kas Lainnya	202.985.062,18	0,00
Jumlah	121.412.516.763,94	83.034.698.805,15

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara laporan operasional dengan neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas Akhir keadaan per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp10.396.432.365.578,93	Rp10.233.719.426.349,30

Ekuitas Awal senilai Rp10.396.432.365.578,93 merupakan saldo awal dari total ekuitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Neraca per 31 Desember 2023. Ekuitas awal Tahun 2022 senilai Rp10.233.719.426.349,30 merupakan saldo awal dari total ekuitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Neraca per 31 Desember 2022.

2. Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp204.041.139.997,70	Rp242.687.986.994,08

Surplus/Defisit - LO tahun 2023 senilai Rp204.041.139.997,70 merupakan selisih antara Pendapatan - LO dan Beban - LO selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebagaimana tertera dalam Laporan Operasional. Surplus/Defisit LO tahun 2022 senilai Rp242.687.986.994,08 merupakan selisih antara Pendapatan - LO dan Beban - LO selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebagaimana tertera dalam Laporan Operasional.

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	(Rp536.472.163.049,99)	(Rp79.975.047.764,45)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar tahun 2023 senilai (Rp536.472.163.049,99) disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan tahun-tahun sebelum



tahun 2023 yang terdiri dari Dampak Perubahan atas Kas, Piutang, Penyisihan Piutang, Persediaan, Investasi, Aset Tetap, Penyusutan, Penyusutan Properti Investasi, Dana Cadangan, Aset Lainnya, dan Utang. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar tahun 2022 senilai (Rp79.975.047.764,45) disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan tahun-tahun sebelum tahun 2022 yang terdiri dari Dampak Perubahan atas Piutang, Penyisihan Piutang, Persediaan, Investasi, Aset Tetap, Penyusutan, Kapitalisasi, Aset Lainnya, dan Utang. Lebih lanjut dapat dirincikan sebagai berikut.

a. Dampak Perubahan atas Kas

Dampak Perubahan atas Kas	31 Desember 2023 Rp161.163.473,00	31 Desember 2022 Rp0,00
----------------------------------	---	-----------------------------------

Dampak Perubahan atas Kas tahun 2023 senilai Rp161.163.473,00 merupakan koreksi saldo awal pada Dinas PMPTSP senilai Rp1.499.520,00 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp159.663.953,00. Dampak Perubahan atas Kas tahun 2022 senilai Rp0,00.

b. Dampak Perubahan atas Piutang

Dampak Perubahan atas Piutang	31 Desember 2023 (Rp54.369.027.416,20)	31 Desember 2022 (Rp876.326.831,63)
--------------------------------------	--	---

Dampak Perubahan atas Piutang tahun 2023 senilai (Rp54.369.027.416,20) dan tahun 2022 senilai (Rp876.326.831,63) merupakan koreksi atas saldo, dengan Rincian sebagai berikut.

Tabel 5.120 Rincian Dampak Perubahan atas Piutang

SKPD	Nilai 2023 (Rp)	Nilai 2022 (Rp)
RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	(1.371.868.432,00)	13.734.891.472,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	11.881.625,00	
Badan Pendapatan dan Aset Daerah (Piutang Insentif)	56.198.414,00	
Badan Pendapatan dan Aset Daerah (Piutang Retribusi)	325.000,00	
Badan Keuangan Daerah	60.812.887.948,00	
Badan Pendapatan dan Aset Daerah (Piutang Lain-lain PAD yang Sah)	(113.885.711.971,20)	(14.611.218.303,83)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Piutang Klinik Pratama)	(540.000,00)	
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Piutang Retribusi)	7.700.000,00	
Jumlah Bersih Penambah Ekuitas	(54.369.027.416,20)	(876.326.831,63)

c. Dampak Perubahan atas Penyisihan Piutang

Dampak Perubahan atas Penyisihan Piutang	31 Desember 2023 (Rp796.309.159,94)	31 Desember 2022 Rp487.136.022,87
---	---	---



Dampak Perubahan atas Penyisihan Piutang pada tahun 2023 karena telah disetorkan ke Kas Daerah senilai (Rp796.309.159,94) dan pada tahun 2022 karena kurang catat piutang senilai (Rp487.136.022,87) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.121 Rincian Dampak Perubahan Atas Penyisihan

SKPD	Nilai 2023	Nilai 2022
	(Rp)	(Rp)
RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	163.818.615,91	798.593.365,87
Dinas Kelautan dan Perikanan	(165.270.743,85)	22.254.500,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6.750.000,00	20.800.000,00
Badan Pendapatan dan Aset Daerah (piutang PKB)	(3.441.364,00)	(372.506.807,57)
Badan Keuangan Daerah (Bagian Lancar)	10.651.503,55	17.994.965,57
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Piutang Retribusi)	45.950.030,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Saldo Awal Klinik Pratama)	270.000,00	0,00
Badan Pendapatan dan Aset Daerah (piutang Retribusi)	9.893.750,00	0,00
Badan Pendapatan dan Aset Daerah (piutang Lain-Lain PAD yang Sah)	(864.628.951,55)	0,00
Jumlah Bersih Penambah Ekuitas	(796.309.159,94)	487.136.022,87

d. Dampak Perubahan Nilai Persediaan

Dampak Perubahan atas Persediaan	<u>31 Desember 2023</u> Rp1.715.810.905,30	<u>31 Desember 2022</u> (Rp2.709.157.756,63)
----------------------------------	---	---

Dampak Perubahan Nilai Persediaan Tahun 2023 senilai Rp1.715.810.905,30 merupakan koreksi Penambahan Nilai Persediaan yang berasal dari Penambahan Persediaan PLTS yang belum diserahkan pada Dinas ESDM senilai Rp647.010.969,00 dan Koreksi Saldo Awal Persediaan RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes senilai Rp1.754.190.108,12 dan pada tahun 2022 dampak perubahan atas persediaan adalah senilai Rp2.709.157.756,63 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.122 Rincian Dampak Perubahan Nilai Persediaan

Uraian	Nilai 2023	Nilai 2022
	(Rp)	(Rp)
Koreksi Penambahan Nilai Persediaan RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	0,00	1.211.462.247,32
Koreksi Kurang Nilai Persediaan pada Dinas Kesehatan	0,00	(3.912.978.003,95)
Koreksi Kurang Nilai Persediaan akibat Penjualan Bibit tanaman dana daya tumbuh rendah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	(7.842.000,00)
Koreksi Saldo Awal Persediaan pada RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	1.754.910.461,24	0,00



Koreksi Saldo Awal Persediaan Bahan Reagensia pada UPTD laboratorium Dinas Kesehatan	(158.605.524,94)	0,00
Koreksi Saldo Awal Persediaan Ternak pada Dinas Peternakan	500.000,00	
Koreksi Saldo Awal Persediaan Barang yang diserahkan pada Dinas PUPR	(528.005.000,00)	
Pengakuan Persediaan pada Dinas ESDM	647.010.969,00	0,00
Jumlah Bersih Menambah Ekuitas	1.715.810.905,30	(2.709.157.756,63)

e. Dampak Perubahan atas Investasi

Dampak Perubahan atas Investasi
31 Desember 2023 **31 Desember 2022**
(Rp15.335.219.729,61) **(Rp 5.831.642.342,70)**

Dampak Perubahan atas Investasi tahun 2023 senilai (Rp15.335.219.729,61) dan tahun 2022 senilai (Rp5.831.642.342,70) merupakan koreksi saldo awal investasi akibat perhitungan Deviden dan nilai ekuitas Tahun sebelumnya, investasi yang dikoreksi antara lain:

Tabel 5.123 Rincian Dampak Perubahan Atas Investasi

No	Uraian	Nilai 2023	Nilai 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Koreksi Investasi pada Bank NTT	(12.163.749.120,23)	(594.614.257,96)
2	Koreksi Investasi pada RT Jamkrida	(3.116.527.823,06)	(3.073.685.579,32)
3	Koreksi Investasi pada PT Fibamar	(54.942.786,32)	(2.150.342.522,03)
4	Koreksi Kurang Catat PT Jamkrida	0,00	2,00
5	Koreksi Kurang Perhitungan Bl. R2 (setoran tahun 2021)	0,00	(13.000.000)
6	Koreksi Tambah Perhitungan R4	0,00	14,61
	Jumlah Bersih Penambah Ekuitas	(15.335.219.729,61)	(5.831.642.342,70)

f. Dampak Perubahan Aset Tetap

Dampak Perubahan atas Aset Tetap
31 Desember 2023 **31 Desember 2022**
Rp 69.226.201.403,46 **Rp15.902.186.562,00**

Dampak Perubahan Aset Tetap Tahun 2023 senilai Rp69.226.201.403,46 dan tahun 2022 senilai (Rp15.902.186.562,00) merupakan penambahan Aset dikurangi Koreksi nilai Aset Tetap, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.124 Rincian Dampak Perubahan Aset Tetap

Uraian	Nilai 2023 (Rp)	Nilai 2022 (Rp)
Penilaian kembali tanah yang berasal dari kemkes di Dinas Kesehatan	9.167.478.156,00	
Bunga pinjaman di JIJ di Dinas PUPR	61.069.423.338,00	
Koreksi Nilai Aset P2D Peralatan dan Mesin di Dinas DLHK	559.921.361,00	
Koreksi Kurang Catat Gedung dan Bangunan di Dinas Peternakan	1.460.378.000,00	
ternak lahir di Dinas Peternakan	345.000.000,00	
Koreksi Kurang Catat Peralatan dan Mesin pada Seida	7.000.000,00	
Apresiasi tanah di Sumtim kabaru pada BPAD	33.190.800.000,00	
Koreksi Hitung Gedung dan Bangunan RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes	(6.526.156.120,00)	



Uraian	Nilai 2023 (Rp)	Nilai 2022 (Rp)
Hitung ulang nilai Kapitalisasi ke Induk Gedung di Dinas Kesehatan	(4.768.552.657,40)	
Hitung ulang nilai Kapitalisasi ke Induk Gedung pada Dinas Sosial	(242.457.600,00)	
Hitung ulang nilai Kapitalisasi ke Induk Gedung pada Dinas DLHK	(787.901.931,24)	
Hitung ulang nilai Kapitalisasi ke Induk Gedung di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	(395.642.200,00)	
Hitung ulang nilai Kapitalisasi ke Induk Gedung di Dinas Kepemudaan dan Olahraga	(725.442.983,77)	
Hitung ulang nilai Kapitalisasi ke Induk Gedung di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(2.817.507.560,00)	
Hitung ulang nilai Kapitalisasi ke Induk Gedung di Dinas Kelautan dan Perikanan	(219.457.333,33)	
Hitung ulang nilai Kapitalisasi ke Induk Gedung di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	(74.144.000,00)	
Hitung ulang nilai Gedung di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	(935.802.617,19)	
Hitung ulang nilai Gedung di Dinas Peternakan	(136.847.720,00)	
Double Catat tanah dan hapus rusak berat di Dinas ESDM	(1.517.000.000,00)	
Ternak Mati dan Jual di Dinas Peternakan		(632.701.705,00)
Koreksi Nilai gedung di Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(1.099.227.600,00)	
Hitung ulang dan Reklas di Sekretariat Daerah	(193.300.000,00)	
Perhitungan Ulang Nilai Bangunan di Setwan	(15.438.263.417,61)	
Koreksi Karena Double Catat tanah di Bapeltbangda	(1.925.000.000,00)	
Perhitungan Ulang Nilai Bangunan di Bapeltbangda	(409.657.550,00)	
Hitung ulang nilai Gedung di BPAD	(7.499.128.997,00)	
Perhitungan Ulang Nilai JIJ di BPAD	(97.132.831,86)	
Koreksi Salah Catat Bedung dan Bangunan di BPSDM	(2.538.208.564,00)	
Koreksi Karena Double Catat Peralatan dan Mesin di BPSDM	(90.000.000,00)	
Perhitungan Ulang Nilai Bangunan di Badan Penghubung	(968.882.683,00)	
Perhitungan Ulang Nilai JIJ di Badan Penghubung	(25.120.307,93)	
Koreksi nilai Aset Tetap berupa Tanah dan Gedung Bangunan yang dikerjasamakan dengan PT Asiabeef di Instalasi Peternakan	(33.140.738.461,54)	
Progres Fisik atas KDP Jalan di PUPR	215.228.990,00	
kapitalisasi aset rehabilitasi Gedung dan Bangunan	45.746.054.644,35	
Koreksi Pencatatan Aset Tetap sesuai LHP Inspektorat pada Dinas Pendidikan (SMKN 2 Kupang)	2.200.000,00	
Koreksi Double Catat Aset Tetap pada Dinas Pendidikan (SMKN Muriabang)	(22.425.000,00)	
Koreksi Pencatatan Aset Tetap sesuai LHP Inspektorat pada Dinas Pendidikan (SMKN Muriabang)	152.670.000,00	
Koreksi Pencatatan Hewan Domba (alat uji penelitian) pada Dinas Kesehatan	6.000.000,00	



Uraian	Nilai 2023 (Rp)	Nilai 2022 (Rp)
Koreksi Kurang Catat 1 ekor Jenis Sapi pada Instalasi Lili (Dinas Peternakan)	6.000.000,00	
Koreksi Ekuitas Awal Ekstrakomptabel berupa koreksi kurang atas Aset Ekstrakomptabel	(191.530.050,00)	
Koreksi atas aset dibawah kapitalisasi pengadaan tahun 2023	104.595.050,00	
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Tanah sekolah yg baru dicatat)		3.760.293.800,00
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Temuan BPKP)		44.364.000,00
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap pada RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang (Gedung yang baru dicatat)		350.000.000,00
Koreksi Kurang Nilai Aset Tetap (Hibah Keluar) pada Dinas Kesehatan		(12.036.000.000,00)
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap akibat Kapitalisasi Bunga tahun lalu ke Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		1.952.333.753,00
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap akibat KDP dri hibah tahun lalu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		897.965.250,00
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap karena kurang catat PM pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		443.365.000,00
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap akibat Penambahan Anak Ternak pada Dinas Peternakan		766.750.000,00
Koreksi Kurang Nilai Aset Tetap akibat koreksi PM pada Dinas Peternakan		(18.809.040,00)
Koreksi Kurang Nilai Aset Tetap akibat koreksi GB pada Dinas Peternakan		(66.000.000,00)
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap pada Sekretariat Daerah (Koreksi double catat tanah yg sudah dicatat kesbangpol)		(318.750.000,00)
Koreksi kurang Nilai Aset Tetap pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah (Koreksi Catat Double Tanah)		(9.990.830.000,00)
Koreksi kurang Nilai Aset Tetap pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah (Koreksi Catat Double PM)		(190.000.000,00)
Koreksi kurang Nilai Aset Tetap pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah (Koreksi hibah PM ke KPU tahun lalu)		(222.685.000,00)
Koreksi Kurang Nilai Aset Tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Koreksi Catat Tanah)		(420.600.000,00)
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap pada Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta (Koreksi Catat Gedung)		63.000.000,00
Koreksi kurang Nilai Aset Tetap pada Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta (Koreksi Catat Gedung)		(283.882.420,00)
Jumlah Bersih Menambah Ekuitas	69.226.201.403,46	(15.902.186.562,00)



g. Dampak Perubahan atas Penyusutan

Dampak Perubahan atas Penyusutan 31 Desember 2023 31 Desember 2022
(Rp510.070.080.899,81) (Rp22.398.668.644,37)

Dampak Perubahan atas Penyusutan Tahun 2023 senilai (Rp510.070.080.899,81) dan tahun 2022 senilai Rp22.398.668.644,37 merupakan koreksi terhadap saldo awal Akumulasi Penyusutan pada:

Tabel 5.125 Rincian Dampak Perubahan Atas Penyusutan

Uraian	Nilai 2023 (Rp)	Nilai 2022 (Rp)
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan JIU pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		(2.000.000,00)
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan pada RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang (Gedung yang baru dicatat)		(315.000.000,00)
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan Gedung pada Dinas Kesehatan		(418.616.974,00)
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan PM pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		(8.982.154.217,82)
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan Gedung pada Sekretariat Daerah		(3.510.702.908,50)
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan catat JIU pada Sekretariat Daerah		17.916.333,33
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan PM pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah		(225.747.886,67)
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan akibat Koreksi Catat Double Peny PM pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah		190.000.000,00
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan akibat Koreksi hibah PM ke KPU tahun lalu pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah		222.686.000,00
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan PM pada Dinas Perhubungan		(8.560.131.683,90)
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan JIU pada Dinas Perhubungan		339.627.400,00
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan PM pada Setwan		(86.496.000,00)
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan JIU pada Energi dan Sumber Daya Mineral		6.258.273,19
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		(9.400.000,00)
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan PM pada Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta		(41.462.000,00)
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan GB pada Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta		(36.540.000,00)
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan GB karena hitung ulang pada Dinas PORA	(82.163.200,00)	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan JIU karena Kurang Catat pada Dinas Peternakan	68.997.614,58	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan PM karena hitung ulang pada Setda	9.750.000,00	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan PM karena tambah Nilai pada Setda	1.148.220.713,28	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan PM karena hitung ulang pada BKD	(768.027.155,00)	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan GB karena hitung ulang pada Dinas Sosial	(67.750.801,68)	



Uraian	Nilai 2023 (Rp)	Nilai 2022 (Rp)
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan JIJ karena hitung ulang pada Dinas DLHK	89.354.826,00	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan PM karena hitung ulang pada Dinas Kesehatan	(6.441.774.671,20)	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan ALT karena hitung ulang pada Dinas KOPNAKERTRANS	26.403.400,00	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan Aset Lainnya karena hitung ulang pada Dinas KOPNAKERTRANS	1.280.174.400,00	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan Aset Lainnya karena hitung ulang pada Dinas Kominfo	(220.049.999,00)	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan PM karena hitung ulang pada Dinas Perhubungan	(3.983.491.104,50)	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan ATL karena hitung ulang pada Dinas Keperisan	36.945.000,00	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan PM karena hitung ulang pada Dinas Kelautan	10.500.000,00	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan PM karena hitung ulang pada Dinas Pariwisata	222.756.000,00	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan PM karena hitung ulang pada Dinas Pertanian	(483.000.000,00)	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan PM karena hitung ulang pada Dinas Pertanian	(3.261.574.720,00)	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan GB karena hitung ulang pada Dinas Peternakan	(1.000.939.720,00)	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan GB karena hitung ulang pada Dinas Peternakan	1.086.700.720,00	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan GB karena hitung ulang pada Setda	(271.837.280,00)	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan PM karena hitung ulang pada Setda	(1.095.721.428,57)	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan PM karena hitung ulang pada Setda	(50.098.137,51)	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan Aset Lainnya karena hitung ulang pada Dinas ESDM	17.000.000,00	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan PM karena hitung ulang pada Dinas PIPA	(220.049.999,00)	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan GB karena hitung ulang pada Dinas PIPA	(149.648.886,06)	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan JIJ karena hitung ulang pada Dinas PIPA	(67.016.119,50)	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan PM karena hitung ulang pada Dinas PTSP	53.180.000,00	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan GB karena hitung ulang pada Dinas PTSP	(5.461.230,00)	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan ATB karena hitung ulang pada Dinas PTSP	(57.800.000,00)	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan JIJ karena hitung ulang pada Dinas PTSP	4.542.692,00	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan PM karena hitung ulang pada Setwan	4.270.761.428,57	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan PM karena hitung ulang pada Dinas Pertanian	220.049.999,00	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan PM karena hitung ulang pada BPAD	(5.887.917.140,85)	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan PM karena hitung ulang pada BPAD	2.247.508.426,57	



Uraian	Nilai 2023 (Rp)	Nilai 2022 (Rp)
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan JIJ karena hitung ulang pada BPAD	2.497.500,00	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan PM karena hitung ulang pada BPSDM	18.622.400,00	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan JIJ karena hitung ulang pada Inspektorat	4.419.132,80	
Mengembalikan pengakuan Aset Tetap dan akumulasi penyusutannya Dinas PK	9.657.500,00	
reklasifikasi Aset Tetap Gedung Bangunan pada BPAD ke akun Properti Investasi akumulasi penyusutannya BPAD	2.496.370.944,40	
Koreksi atas lebih catat akumulasi penyusutan aset JIJ pada Dinas Penanaman Modal Satu Pintu dikarenakan kelebihan masa manfaat	31.738.125,34	
Mengakui Aset Tetap pada SMKN 2 Kupang Dinas PK	(550.000,00)	
Mengakui Penyusutan atas pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari tahun-pengadaan 2019 dan telah habis-ditahun 2022 sehingga seluruhnya dicatat pada koreksi ekuitas	(152.670.000,00)	
Koreksi mengembalikan nilai Aset Tetap Gedung Bangunan yang dikerjasamakan dengan PT Asiabeef di Instalasi Peternakan, Kabarut Sumba Timur menjadi nilai perolehan bukan nilai wajar dengan selisih nilai perolehan dan wajar	(1.155.698.334,58)	
Koreksi atas hasil rekalkulasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dikarenakan perubahan kebijakan akuntansi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(189.170.729.065,72)	
Koreksi atas hasil rekalkulasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dikarenakan perubahan kebijakan akuntansi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(51.736.667.935,74)	
Koreksi atas hasil rekalkulasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dikarenakan perubahan kebijakan akuntansi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	(272.164.256.839,50)	
Koreksi atas hasil rekalkulasi Amortisasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dikarenakan perubahan kebijakan akuntansi Aset Tetap Aset Tidak Berwujud	(5.151.344.933,74)	
Jumlah Bersih Penambah Ekuitas	(510.070.080.899,81)	(22.398.668.644,37)

h. Dampak Perubahan atas Kapitalisasi

Dampak Perubahan atas Kapitalisasi	31 Desember 2023 Rp0,00	31 Desember 2022 (Rp5.264.250.938,24)
---	--	--

Dampak Perubahan atas Kapitalisasi tahun 2023 senilai Rp0,00 dan tahun 2022 senilai (Rp5.264.250.938,24). Pada tahun 2023 perubahan dampak Kapitalisasi disajikan pada Dampak Perubahan atas Aset Tetap, dengan rincian pada tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.126 Rincian Dampak Perubahan Atas Kapitalisasi Tahun 2022

SKPD	Nilai 2022 (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(4.370.892.110,64)
RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	(126.588.685,60)



SKPD	Nilai 2022 (Rp)
Dinas Kesehatan	(2.515.000,00)
Dinas Pekerjaan Umum Umum dan Perumahan Rakyat	
Satuan Polisi Pamong Praja	(8.500.000,00)
Dinas Sosial	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(17.904.000,00)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(1.464.700,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	(6.250.000,00)
Dinas Perhubungan	(4.087.002,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	(7.911.250,00)
Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
Dinas Pemuda dan Olahraga	(1.529.000,00)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(690.197.390,00)
Dinas Kelautan dan Perikanan	(1.425.000,00)
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	(14.754.400,00)
Dinas Peternakan	(385.500,00)
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(390.000,00)
Badan Pendapatan dan Aset Daerah	(3.446.500,00)
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(1.005.000,00)
Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	(4.390.000,00)
Inspektorat Daerah	(615.400,00)
Jumlah Bersih Penambah Ekuitas	(5.264.260.938,24)

i. **Dampak Perubahan atas Properti Investasi**

Dampak Perubahan atas Penyusutan Properti Investasi	<u>31 Desember 2023</u> (Rp2.496.370.944,40)	<u>31 Desember 2022</u> Rp0,00
---	---	-----------------------------------

Dampak Perubahan atas Properti Investasi Tahun 2023 senilai (Rp2.496.370.944,40) merupakan koreksi atas saldo Awal Penyusutan Aset Properti Investasi. Dampak Perubahan pada Tahun 2022 adalah Rp0,00.

a. **Dampak Perubahan atas Dana Cadangan**

Dampak Perubahan atas Dana Cadangan	<u>31 Desember 2023</u> (Rp320.446.456,50)	<u>31 Desember 2022</u> Rp0,00
--	---	-----------------------------------

Dampak perubahan atas Dana Cadangan senilai (Rp320.446.456,46) merupakan koreksi atas saldo awal pada Badan Keuangan Daerah yakni Nilai Dana Cadangan Tahun 2022. Dampak Perubahan pada tahun 2022 senilai Rp0,00.

b. **Dampak Perubahan atas Aset Lainnya**

Dampak Perubahan atas Aset Lainnya	<u>31 Desember 2023</u> Rp17.446.110.461,54	<u>31 Desember 2022</u> (Rp27.773.185.476,72)
--	--	--

Dampak perubahan atas Aset Lainnya Tahun 2023 senilai Rp17.446.110.461,54 merupakan Koreksi Penambahan Aset Lain KSP pada Badan Pendapatan dan Aset daerah. Dampak perubahan atas Aset lainnya Tahun 2022 adalah senilai Rp27.773.185.476,72. Aset lain-lain yang dikoreksi antara lain:



Tabel 5.127 Rincian Dampak Perubahan Atas Aset Lain

SKPD	Nilai 2023 (Rp)	Nilai 2022 (Rp)
Badan Pendapatan dan Aset Daerah (KSP)	17.446.110.461,54	
Badan Keuangan (Koreksi kurang catat aset RB)		7.500.000,00
Badan Keuangan (Koreksi kurang catat Akm. aset RB)		(7.500.000,00)
Badan Keuangan (Koreksi TPTGR)		(27.722.867.144,72)
Jumlah Bersih Penambah Ekuitas	17.446.110.461,54	(27.722.867.144,72)

c. Dampak Perubahan atas Utang

Dampak Perubahan atas Utang	31 Desember 2023 (Rp41.633.994.686,83)	31 Desember 2022 Rp293.234.764,97
------------------------------------	---	--

Dampak Perubahan atas Utang senilai (Rp41.633.994.686,83) terdiri dari:

- 1) Koreksi Transfer atas penyaluran Pajak Rokok senilai (Rp41.291.281.389,00) atas pengakuan Pendapatan Transfer Pajak Rokok senilai Rp60.812.887.948,00 bulan Desember Tahun 2022 yang baru disalurkan di tahun 2023.
- 2) Koreksi pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka - Lain-lain PAD yang Sah tahun sebelumnya senilai (Rp867.525.169,19) untuk kekurangan pengakuan nilai Pendapatan Diterima Dimuka senilai Rp1.018.095.169,19.
- 3) Koreksi atas Penerimaan Dimuka senilai Rp525.000.000,00 terdiri dari saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas PT SMA per 31 Desember 2023 senilai Rp375.000.000,00 dan senilai Rp150.000.000,00 sebelumnya telah diakui sebagai Pendapatan - LO tahun 2023 sesuai atas perjanjian sewa tanah dengan PT Sarana Masa Abadi yang telah putus kontrak di tahun 2021 berdasarkan Surat PHK Nomor BU.030/184/BPAD/2021.
- 4) Merupakan Koreksi Utang Barang dan jasa pada BLUD RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang senilai (Rp188.128,64).

2. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir	31 Desember 2023 Rp10.064.001.342.526,64	31 Desember 2022 Rp10.396.432.365.578,93
----------------------	---	---

Ekuitas Akhir senilai Rp10.064.001.342.526,64 adalah Total Ekuitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2023 dan Ekuitas Akhir tahun 2022 senilai Rp10.396.432.365.578,93 adalah Total Ekuitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2022.



BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. INFORMASI TAMBAHAN

Informasi tambahan berikut dipandang perlu diketahui oleh *stakeholders* terutama untuk mencegah kesalahan interpretasi atas laporan keuangan.

1. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga dialokasikan sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023, tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan perubahan terakhir Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2023, tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp11.055.939.527,00, sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp882.798.125,00 ke Perangkat Daerah untuk Belanja Darurat Bencana, Keperluan Mendesak, Belanja Bansos yang tidak direncanakan dan Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6.1 Daftar Realisasi Belanja Tak Terduga, Berdasarkan SK Gubernur NTT

No.	Uraian	Usulan SKPD	Nilai (Rp)	Peruntukan SKPD
1.	SK Gubernur Nomor: 900/28/BKUD4/2023, Tanggal, 6 Januari 2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	451.983.000,00	Penanganan Jalan Alternatif Akibat Bencana di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2023
2.	SK Gubernur Nomor: 900/70/BKUD4/2023, Tanggal, 17 Februari 2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	270.000.000,00	Penanganan Jalan Alternatif Akibat Bencana di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2023
3.	SK Gubernur Nomor: 900/94/BKUD4/2023, Tanggal, 31 Maret 2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	88.018.000,00	Penanganan Darurat Akses Jalan Alternatif Akibat Bencana di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2023
4.	Restitusi kepada Dealer untuk kelebihan pemotangan BBNK	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	4.688.250,00	Pengembalian kelebihan pemotangan BBNK atas nama Adam Lape Bernabas Haki yang disetor ke Kas Daerah
5.	Restitusi kepada Dealer untuk kelebihan pemotangan BBNK	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	4.688.250,00	Pengembalian kelebihan pemotangan BBNK atas nama Desri Pellondou yang disetor ke Kas Daerah
6.	Restitusi kepada Sinyo Antonius Parera Fernandez untuk kelebihan pemotangan PKB dan BBNK	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	2.336.250,00	Pengembalian kelebihan pemotangan BBNK atas nama Sinyo Antonius Parera Fernandez yang disetor ke Kas Daerah
7.	Restitusi kepada Dealer untuk	Badan Pendapatan	2.881.375,00	Pengembalian kelebihan pemotangan BBNK atas



No.	Uraian	Usulan SKPD	Nilai (Rp)	Peruntukan SKPD
	kelebihan pemotangan PKB dan BBNK	dan Aset Daerah		nama Fransiskan Rima Tallo yang disetor ke Kas Daerah
8.	Restitusi kepada Dealer untuk kelebihan pemotangan PKB dan BBNK	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	23.051.000,00	Pengembalian kelebihan pemotangan BBNK atas nama Fransiskan Rima Tallo yang disetor ke Kas Daerah
9.	Restitusi kepada Mersi Selan untuk kelebihan pemotangan PKB	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	5.152.000,00	Pengembalian kelebihan pemotangan BBNK atas nama Mersi Selan yang disetor ke Kas Daerah
10.	SK Gubernur Nomor: 900/258/BKUD4/2023, Tanggal 22 Desember 2023	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTT	30.000.000,00	Pengendalian Inflasi Daerah melalui penguatan dana tahanan dan daya beli 200 warga miskin penerima manfaat di Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2023
Jumlah			882.798.125,00	

Dari realisasi Belanja Tak Terduga senilai Rp750.141.125,00, pengembalian belanja tahun berjalan senilai Rp42.797.125,00 mengurangi pendapatan sehingga total realisasi belanja Tak Terduga menjadi senilai Rp707.344.000,00. Terhadap Belanja Tak Terduga senilai Rp707.344.000,00 telah diatribusikan ke masing-masing beban sesuai dengan sifat atau substansinya sehingga diakui pada Beban Barang dan Jasa sesuai sifatnya. Rincian realisasi belanja berdasarkan realisasi SP2D sebagai berikut.

Tabel 6.2 Rincian Realisasi Belanja, Berdasarkan Realisasi SP2D

No	Kode Rekening	Uraian	Realisasi SP2D (Rp)		Realisasi SPJ (Rp)		Sisa Anggaran (Rp)	
			Belanja Barang dan Jasa	Jumlah	Belanja Barang dan Jasa	Jumlah	Belanja Barang dan Jasa	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (6-7)
1	5.1.02.03.04.0012	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-Penanganan Jalan Alternatif	451.983.000,00	367.274.000,00	367.274.000,00	84.709.000,00	84.709.000,00	451.983.000,00
2	5.1.02.01.01.0001	Belanja bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Belanja Gorong-gorong jalan	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00
	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- BBM untuk alat dan kendaraan	119.825.000,00	119.825.000,00	119.825.000,00	0,00	0,00	119.825.000,00
	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makan dan Minum Aktivitas Iapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Belanja Makanan dan Minuman	30.375.000,00	30.375.000,00	30.375.000,00	0,00	0,00	30.375.000,00



No	Kode Rekening	Uraian	Realisasi SP2D (Rp)		Realisasi SPJ (Rp)		Sisa Anggaran (Rp)	
			Belanja Barang dan Jasa	Jumlah	Belanja Barang dan Jasa	Jumlah	Belanja Barang dan Jasa	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5-7)
		Aktivitas Lapangan						
3	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Belanja Material Timbunan Pohon	56.268.000,00	8.320.000,00	8.320.000,00	47.948.000,00	47.948.000,00	56.268.000,00
	5.1.02.02.01.0003	Belanja Jasa Tenaga Supir						
		- Upah harian Operator Excavator						
		- Operator	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
		- Pembantu Operator	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan bahan Bakar dan Pelumas						
		- BBM untuk Alat dan Kendaraan	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00
	5.1.02.02.04.003	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutah Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Mobilisasi Alat Excavator (sewa Tronton)	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4		Restitusi Pajak kendaraan	4.688.250,00	4.688.250,00	4.688.250,00	0,00	0,00	4.688.250,00
5		Restitusi Pajak kendaraan	4.688.250,00	4.688.250,00	4.688.250,00	0,00	0,00	4.688.250,00
6		Restitusi Pajak kendaraan	2.336.250,00	2.336.250,00	2.336.250,00	0,00	0,00	2.336.250,00
7		Restitusi Pajak kendaraan	2.881.375,00	2.881.375,00	2.881.375,00	0,00	0,00	2.881.375,00
8		Restitusi Pajak kendaraan	23.051.000,00	23.051.000,00	23.051.000,00	0,00	0,00	23.051.000,00
9		Restitusi Pajak kendaraan	5.152.000,00	5.152.000,00	5.152.000,00	0,00	0,00	5.152.000,00
10	5.1.02.01.01.0043	Belanja Makan Minum						
		-Beras SPHP 5 Kg	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
		-Telur Ayam Ras 1 Papan	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
		-Minyak Goreng Kita	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		Jumlah	882.798.125,00	750.141.125,00	750.141.125,00	132.657.000,00	132.657.000,00	882.798.125,00



Berdasarkan data realisasi belanja sebagaimana tabel di atas maka realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai SP2D senilai Rp882.798.125,00 dipertanggungjawabkan senilai Rp750.141.125,00 dan sisa yang disetor kembali ke Kas Daerah senilai Rp132.657.000,00 pada tahun 2023. Dari total pertanggungjawaban senilai Rp750.141.125,00, yang diakui sebagai Belanja Tak terduga sesuai peruntukannya senilai Rp707.344.000,00. Rincian Belanja Operasi yang bersumber dari BTT antara lain:

Tabel 6.3 Daftar Rincian Belanja Operasi yang bersumber dari BTT

Uraian	Nilai (Rp)
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	30.000.000,00
Belanja bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi	128.320.000,00
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	367.274.000,00
Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	119.625.000,00
Belanja Makan dan Minum Aktivitas lapangan	30.375.000,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	1.150.000,00
Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	15.800.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	15.000.000,00
Jumlah	707.344.000,00

Rincian Pengembalian Belanja Tak Terduga (BTT) ke Kas Daerah sebagai berikut.

Tabel 6.4 Daftar Rincian Pengembalian BTT ke Kas Daerah

No	SKPD	Setoran	
		Tanggal	Jumlah
1	Dinas PUPR (Penanganan jembatan darurat di Kab. Kupang)	4 Mei 2023	84.709.000,00
2	Dinas PUPR (Penanganan jembatan darurat di Kab. Kupang)	2 Agustus 2023	47.948.000,00
	Jumlah		132.657.000,00

Dari total realisasi BTT senilai Rp882.798.125,00 sesuai SK Gubernur, dengan senilai Rp750.141.125,00 telah diatribusikan ke masing-masing jenis beban, tersisa senilai Rp42.707.125,00 yang merupakan restitusi pajak kemudian menjadi pengurang pendapatan sehingga nilai BTT akhir adalah senilai Rp707.344.000,00 dan saldo Beban Tak Terduga senilai Rp0,00.

2. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2023

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Menengah yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik. Penerima dan jumlah dana BOS pada setiap satuan pendidikan (Satdik) berdasarkan alokasi dana BOS setiap Provinsi dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan. Perencanaan, penganggaran dan Penatausahaan Dana BOS setiap Satuan Pendidikan pada APBD Provinsi dijabarkan melalui program dan kegiatan serta belanja Hibah;

- Dalam bentuk program dan kegiatan bagi Satuan Pendidikan Menengah Negeri (SMAN, SMKN, SLBN) yang diselenggarakan oleh Pemerintah



Provinsi, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan

- b. Dalam bentuk Hibah bagi Satuan Pendidikan Menengah Swasta (SMA, SMK, SLB) yang diselenggarakan oleh yayasan atau masyarakat yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Petunjuk teknis pengelolaan Dana Bos dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah. Penerimaan Dana BOS pada APBD Provinsi tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun ditransfer oleh Kementerian Keuangan RI langsung ke rekening sekolah, baik Satdikdas maupun Satdikmen (Negeri maupun Swasta). Hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023. Pengakuan realisasi pendapatan Dana BOS oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan melalui penetapan/penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) oleh BUD, setelah menerima notifikasi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kupang. Total Realisasi Pendapatan Dana BOS TA 2023 sesuai 16 SP2T yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT selaku BUD senilai Rp520.024.064.512,00 atau 99,60% dari total anggaran senilai Rp522.122.590.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6.5 Rincian SP2T Pendapatan BOS

No.	Tanggal SP2T	Nomor SP2T	Nilai (Rp)
1	03 Juli 2023	900.1.3.2/1397/BKUD4.1/2023	1.077.171.500,00
2	03 Juli 2023	900.1.3.2/1397/BKUD4.1/2023	3.133.750.000,00
3	03 Juli 2023	900.1.3.2/1397/BKUD4.1/2023	65.370.895.000,00
4	03 Juli 2023	900.1.3.2/1397/BKUD4.1/2023	3.400.975.000,00
5	03 Juli 2023	900.1.3.2/1397/BKUD4.1/2023	28.180.771.620,00
6	03 Juli 2023	900.1.3.2/1397/BKUD4.1/2023	154.379.820.392,00
7	03 Juli 2023	900.1.3.2/1397/BKUD4.1/2023	497.250.000,00
8	03 Juli 2023	900.1.3.2/1397/BKUD4.1/2023	2.130.817.000,00
9	03 Juli 2023	900.1.3.2/1397/BKUD4.1/2023	1.244.484.400,00
10	01 Desember 2023	900.1.3.2/2500/BKUD4.1/2023	234.325.875.000,00
11	01 Desember 2023	900.1.3.2/2500/BKUD4.1/2023	2.378.840.000,00
12	01 Desember 2023	900.1.3.2/2500/BKUD4.1/2023	228.780.000,00
13	01 Desember 2023	900.1.3.2/2500/BKUD4.1/2023	14.981.075.000,00
14	01 Desember 2023	900.1.3.2/2500/BKUD4.1/2023	3.903.267.000,00
15	01 Desember 2023	900.1.3.2/2500/BKUD4.1/2023	272.342.600,00
16	01 Desember 2023	900.1.3.2/2500/BKUD4.1/2023	6.508.750.000,00
Jumlah			520.024.064.512,00

Dari total realisasi pendapatan, berdasarkan penetapan SP2T sebagaimana di atas, dijabarkan untuk Belanja Hibah dan Belanja Program Kegiatan, pada APBD Provinsi NTT TA. 2023 dengan rincian sebagai berikut.

**a. Dana BOS melalui Belanja Hibah**

Penyaluran Dana BOS, melalui Belanja Hibah pada APBD Provinsi NTT dialokasikan senilai Rp29.892.191.735,00, namun terealisasi senilai Rp176.122.330.906,00 atau 589,19%. Total realisasi Belanja Hibah Dana BOS kepada 22 Kab/Kota adalah senilai Rp176.122.330.906,00 merupakan Satdikmen Swasta yang menjadi kewenangan Provinsi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6.6 Rincian Realisasi Belanja Hibah Dana BOS

No	Satuan Pendidikan (Satdik)	Rincian	Nilai (Rp)
1	Menengah Swasta	SMA Swasta (22 Kab/Kota)	97.257.986.281,00
		SMK Swasta (22 Kab/Kota)	75.589.544.625,00
		SILB Swasta (22 Kab/Kota)	3.284.800.000,00
Total			176.122.330.906,00

Tabel 6.7 Rincian SP2H Pendapatan BOS NTT

No	Tanggal SP2H	Nomor SP2H	Nilai (Rp)
1	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	1.760.930.000,00
2	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	1.760.930.000,00
3	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	90.000.000,00
4	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	3.797.211.275,00
5	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	3.785.260.000,00
6	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	90.000.000,00
7	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	4.515.749.500,00
8	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	4.540.300.000,00
9	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	350.000.000,00
10	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	3.075.391.500,00
11	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	3.075.440.000,00
12	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	365.000.000,00
13	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	2.072.011.363,00
14	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	2.076.680.000,00
15	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	70.000.000,00
16	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	1.648.489.700,00
17	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	1.648.475.000,00
18	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	90.000.000,00
19	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	4.145.538.000,00
20	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	4.076.895.000,00
21	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	135.000.000,00
22	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	15.068.123.700,00
23	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	15.068.155.000,00
24	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	255.000.000,00
25	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	3.873.446.200,00
26	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	3.873.450.000,00
27	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	270.000.000,00
28	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	3.331.019.500,00
29	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	3.331.020.000,00
30	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	45.000.000,00
31	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	2.601.495.000,00
32	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	2.601.495.000,00
33	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	115.000.000,00
34	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	3.231.180.000,00